

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Ndout ^{a,1*}, Sopanah ^{a2}, Dewi ^{a3}

^aUniversitas Widyagama Malang, Negara Republik Indonesia

¹ahmadndout144@gmail.com*

*korespondensi penulis

Received: 24 September 2023; Revised: 06 Oktober 2023; Accepted: 10 Oktober 2023

Abstrak

Penelitian ini mengenai akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik yang bertujuan untuk menilai praktek pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN berdasarkan ISAK 35. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu survei, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada informan Partai Gerindra. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Partai Gerindra dalam mengelola keuangannya sudah dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Keuangan

Abstract

This research is about the financial accountability and transparency of political parties and aims to assess financial management practices sourced from the APBN based on ISAK 35. In this research, the researcher used quantitative descriptive research methods, using data collection techniques, namely surveys, interviews, and documentation carried out on Parati informants. Gerindra. The results of this research show that the Gerindra Party has been accountable and transparent.

Keywords: Accountability, Transparency, Finance

PENDAHULUAN

Dierah demokrasi yang menjamin kebebasan publik untuk berserikat, berpendapatan merupakan sebuah progresifitas yang patut dipertahankan, kemunculan organisasi-organisasi nirlaba merupakan imbas dari adanya keterbukaan kran demokrasi yang mempunyai peran penting dalam membangun dan menata tatanan berbangsa dan bernegara(Amer 2017). Entitas nirlaba yang berkembang pesat dierah demokrasi menjadikannya sebagai sektor yang amat berpengaruh dalam kontribusinya membangun Bangsa dan Negara(Asrini 2023). Organisasi nirlaba dalam proses kinerjanya tidak berorientasi pada keuntungan untuk mengakumulasikan modal, sehingga di setiap organisasi nirlaba dalam menggerakkan roda organisasinya mengandalkan dukungan dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat, Pemerintah lewat APBN/APBD, lembaga-lembaga donator lainnya (Ana Sopanah et al. 2023). Hal ini selaras dengan ISAK Nomor 35 yang menjelaskan bahwa entitas nirlaba adalah entitas yang berorientasi dalam bidang pelayanan masyarakat bukan untuk mencari laba(Efrida Sari Ramayani, Nurlaila, and Sudiarti 2023). Artinya di setiap entitas nirlaba baik yang di kelolah pemerintah maupun swasta mempunyai visi yang sama, yaitu untuk melayani, mengayomi seluruh lapisan masyarakat sebagai objek dalam orientasi entitas nirlaba(Elfadarayanti 2021).

Dari sekian banyaknya entitas nirlaba di Indonesia salah satu yang sangat berpengaruh di hampir semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara adalah partai politik (Zamzam et al. 2021). Selain sebagai pilar demokrasi partai politik juga hadir sebagai perantara atau penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik di pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945(Natasyah 2019). Partai politik yang juga dikenal sebagai organisasi kader, amat besar tanggung jawabnya untuk menjalankan tugasnya dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara, oleh sebab itu dukungan keuangan merupakan hal urgen bagi partai politik agar dapat menjalankan tugasnya sebagai organisasi pengabdian untuk bangsa dan negara(Dahlia, Nurhidayah, and Listiawati 2019).

Fenomena terkait skandal korupsi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh partai politik baik yang berada dipemerintah eksekutif maupun legislatif, ditingkat pusat maupun daerah menginterpretasi publik bahwa partai politik adalah lumbung perusak bangsa dan negara(Juniar 2021). Hal ini selaras dengan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat ada 397 pejabat politik yang terjerat skandal korupsi sejak tahun 2004 hingga Mei 2020(Dewa Rumphas 2016). Sedangkan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat jumlah kasus yang ditangani KPK, Kejaksaan dan Kepolisian ada 253 kepala daerah dan 503 anggota DPR/DPRD yang menjadi tersangka korupsi dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,29 triliun(Ruhadi 2021). Kondisi-kondisi ini disebabkan karena partai politik membutuhkan dana yang sangat besar untuk melakukan aktifitas-aktisitasnya, sehingga para tokoh-tokoh partai politik yang mempunyai jabatan publik tersebut melakukan tindak penggelapan dana. Hal ini juga disebabkan oleh minimnya akuntabilitas dan transparansi organisasi sehingga

berdampak pada kurangnya pengawasan publik dan tingginya kecenderungan dalam mementingkan kepentingan kolega atau golongan tertentu dan bukan lagi kepentingan masyarakat dan negara (Rafiansyah, Aisyah, and Satrio 2022).

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 mengatakan bahwa terdapat tiga jenis sumber keuangan partai yaitu; iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari APBN/APBD (Rakia 2021). Namun pada kenyataannya partai politik masih saja mencari jalan pintas untuk mendapatkan dana, kondisi ini terbukti dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang masih marak terjadi. Hal demikian menunjukkan bahwa tidak cukup mengatasi korupsi dengan memberi bantuan dana, melainkan melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan partai secara benar (Marbun 2022). Hal ini selaras dengan perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mewajibkan setiap entitas nirlaba yang memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD wajib melaporkan laporan pertanggung jawabannya kepada KPK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 (ISAK Nomor 35) sebagai pedoman dalam Menyusun laporan keuangan entitas nirlaba (Maulana and Rahmat 2021).

Dalam ISAK Nomor 35 menjelaskan bahwa akuntabilitas atau dalam kata lain pertanggungjawaban atas keuangan yang dikelola oleh suatu entitas publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Maka indikator untuk melihat tingkat akuntabilitasnya adalah dengan adanya pencatatan sampai dengan pelaporan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan (Ratna et al. 2023) yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban keuangan terdiri dari pencatatan dan pelaporan. Pencatatan sendiri terdiri dari pencatatan atas semua transaksi penerimaan, memelihara bukti atas transaksi penerimaan, melakukan pencatatan atas semua transaksi yang pengeluaran, melakukan pembukuan atas semua transaksi keuangan. Sedangkan dalam ISAK Nomor 35 menjelaskan laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan asset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Maulana and Rahmat 2021). Artinya dalam bentuk akuntabilitas keuangan partai politik harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selaras dengan akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sukran, Rajindra, and Yusuf 2020) menemukan bahwasanya secara procedural partai politik telah mempertanggungjawabkan keuangan tersebut pada pemerintah dan telah diaudit oleh BPK, kemudian secara transparansi partai sudah melakukan secara maksimal dengan melaporkan kepada pemerintah dan masyarakat, namun secara keuangan masih belum akuntabel. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh (Abadi 2020) pun menemukan hasil yang sama yaitu akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik masih rendah. Bukti lainnya menurut (Juliestar 2018) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dan transparansi keuangan partai politik belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan dana bantuan partai politik yang tidak sesuai dengan fungsinya dan penggunaan dana parpol sangat tertutup kepada publik. Pertanggungjawaban Partai politik malah banyak digunakan untuk operasional partai politik, operasional kantor saja, padahal seharusnya dana tersebut digunakan untuk perekrutan kader, pendidikan politik dimasyarakat dan sosialisasi politik (Nurimansyah and Ariyani 2020).

Hal-hal terkait akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik ini yang kemudian memantik peneliti untuk melakukan penelitian di partai politik Gerindra. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menjadi salah satu partai dengan elektabilitas tertinggi kedua di Indonesia setelah PDI Perjuangan berdasarkan hasil survey yang dilakukan CPCS(Lailatul Khadri et al. 2022). Kemudian pada Pemilu 2014 perolehan suara Gerindra meningkat menjadi 14,75 juta suara, atau 11,81% dari 124,88 juta suara sah nasional. Perolehan suara tersebut merupakan yang terbesar ketiga setelah PDI Perjuangan (18,96%) dan Partai Golkar (14,75%). Wakil Gerindra di DPR pada 2014 pun bertambah menjadi 73 orang. Berikutnya pada Pemilu 2019 perolehan suara Gerindra kembali meningkat menjadi 17,23 juta, atau 12,31% dari 129,97 juta suara sah nasional (Siahaan, 2019). Hal tersebut akan berpengaruh terhadap besarnya bantuan keuangan dari pemerintah kepada partai politik tersebut. Dari penjelasan tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan judul “Analisi Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Partai Politik Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi Pada DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra))”

METODE (Level 1)

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif digunakan karena metode ini dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau mendeskripsikan suatu keadaan secara objektif (Prasko, Bambang Sutomo, Bedjo Santoso 2016).

Lokasi Penelitian

DPP Partai Gerindra yang berlokasi di Jl. Harsono RM no. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12160.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survei, wawancara dan dokumentasi. Survei Margono (2005), Survei ialah pengamatan/penyeledikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang terang dan baik terhadap suatu persoalan tertentu dan di dalam suatu daerah tertentu. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan langsung dilokasi penelitian dengan memanfaatkan informasi yang ada. Dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklarifikasi serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN (Level 1)

Pada penelitian ini, terdapat tiga informan yang merupakan pengurus Partai Gerindra yang dipilih dan masih aktif dalam seluruh rangkaian agenda-agenda kepartaian, sehingga dari informan tersebut amat banyak mengetahui tentang akuntabilitas dan transparansi keuangan partai itu sendiri. Tiga informan tersebut antara lain Sarifudin, Zulkifli dan Hesti, untuk selanjutnya peneliti akan menyebutkan dalam bentuk inisial nama informan. Jika disusun dalam bentuk tabel akan menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.
Daftar Informan

No.	Nama	Status
1.	S	Pengurus Gerindra
2.	Z	Pengurus Gerindra
3.	H	Pengurus Gerindra

Sumber: Data diolah peneliti 2023

Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dari Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya maka peneliti mendapatkan poin penting tentang kesadaran akan akuntabilitas keuangan partai mereka mengenai urgensi akuntabilitas khususnya keuangan partai politik dari informan;

"Kami dipartai kan mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga kami juga harus mempertanggungjawabkan kepada publik." (S, 16-09-2023)

"Setiap partai politik itu pasti memperoleh keuangan dari publik, dikami pun begitu, sehingga alangkah bijaknya ketika kita mempertanggungjawabkan kepada mereka dan itu kami lakukan bukan sekedar kata-kata saja"(Z, 09 -16 -2023)

"ini kan uang publik, maka wajib untuk kita pertanggungjawabkan kepada semuanya" (H 16-09-2023)

Dari cuplikan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwasannya para informan dari pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya secara umum sangat menyadari bahwa betapa pentingnya melakukan akuntabilitas dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, hal ini karena agar mendapat kepercayaan publik. Dari kutipan serta penjelasan diatas, jika digambarkan dalam berbentuk tabel akan berbentuk sebagai berikut:

Tabel 2.
Daftar Informan

No	Cuplikan	Informan	Urgensi Pernyataan	Makna
1.	<i>"Kami dipartai kan mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga kami juga harus"</i>	<i>(S, 16-09-2023)</i>	<i>"kesadaran atas kewajiban mempertanggungjawabkan keuangan publik"</i>	Informan S sangat menyadari tentang

	<i>mempertanggungjawabkan kepada publik."</i>			pentingnya akuntabilitas
2.	<i>"Setiap partai politik itu pasti memperoleh keuangan dari publik, dikami pun begitu, sehingga alangkah bijaknya ketika kita mempertanggungjawabkan kepada mereka dan itu kami lakukan bukan sekedar kata-kata saja"</i>	(Z, 09 -16 -2023)	<i>"pertanggungjawaban bentuk dari kebijaksanaan"</i>	Informan Z sangat memahami urgensi akuntabilitas keuangan partai
3.	<i>"ini kan uang publik, maka wajib untuk kita pertanggungjawabkan kepada semuanya"</i>	(H 16-09-2023)	Kesadaran yang tinggi akan kewajiban pengelolaan uang publik	Informan H sangat menyadari kewajibannya kepada publik

Sumber: Data diolah peneliti 2023

Bentuk Akuntabilitas Keuangan Partai Gerindra

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan maka peneliti mendapatkan poin penting tentang pengetahuan informan mengenai bentuk akuntabilitas khususnya keuangan partai politik dari informan;

"Bentuknya itu laporan keuangan yang biasanya dibuat oleh bendahara" (S, 16-09-2023)

"bentuk akuntabilitasnya dibuatkan laporan keuangan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran" (Z, 09 -16 -2023)

"bentuknya itu dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan" (H 16-09-2023)

Bila dilihat dari cuplikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa para informan dari Partai Gerakan Indonesia Raya, yang secara umum sangat mengetahui bentuk dari pada akuntabilitas partai Gerakan Indonesia Raya. . Dari kutipan serta penjelasan diatas, jika digambarkan dalam berbentuk tabel akan berbentuk sebagai berikut:

Tabel 3.

Pengetahuan Informan Tentang Bentuk Akuntabilitas Partai Gerakan Indonesia raya				
No	Cuplikan	Informan	Pengetahuan	Makna
1.	<i>"Bentuknya itu laporan keuangan yang biasanya"</i>	(S, 16-09-2023)	<i>"laporan keuangan"</i>	Informan S sangat mengetahui bentuk akuntabilitas

	dibuat oleh bendahara" (S, 16-09-2023)			
2.	"bentuk akuntabilitasnya dibuatkan laporan keuangan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran" (Z, 09 -16 -2023)	(Z, 09 -16 -2023)	"laporan keuangan perihal pemasukan dan pengeluaran"	Informan Z sangat mengetahui bentuk akuntabilitas dari partai Gerakan Indonesia Raya
3.	"bentuknya itu dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan" (H 16-09-2023)	(H 16-09-2023)	Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan	Informan H sangat mengetahui bentuk akuntabilitas partai Gerakan Indonesia Raya

Sumber: Data diolah peneliti 2023

Transparansi Keuangan Partai Gerakan Indonesia Raya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan dari pengurus partai Gerakan Indonesia Raya, maka peneliti mendapatkan poin urgen yang berkaitan dengan pengetahuan informan tentang transparansi keuangan partai politik Gerakan Indonesia Raya:

"berbicara transparansi artinya berbicara tentang keterbukan akses, kemudahan yang berkaitan dengan keuangan partai,itu aja" (S, 16-09-2023)

"Transparansi itu kan keterbukaan secara terang benderang ataupun secara menyeluruh" (S, 16-09-2023)

"Transparansi itu adalah keterbukaan informasi kepada publik atau stakeholder" (Z 16-09-2023)

Dari cuplikan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya para informan dari pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya secara umum sangat memahami tentang transparansi keuangan partai politik Gerakan Indonesia Raya. Jika dilihat dari kutipan serta penjelasan diatas, maka bilah digambarkan dalam berbentuk tabel akan terbentuk sebagai berikut:

Tabel 4.

Urgensi Pernyataan Informan Tentang Transparansi

No	Cuplikan	Informan	Urgensi Pernyataan	Makna
1.	<i>"berbicara transparansi artinya berbicara tentang keterbukan akses, kemudahan yang berkaitan dengan keuangan partai,itu aja"</i>	(S, 16-09-2023)	"keterbukaan akses"	Informan S sangat memahami tentang transparansi
2.	<i>"Transparansi itu kan keterbukaan secara terang benderang ataupun secara menyeluruh"</i>	(Z, 16-09-2023)	"keterbukaan secara menyeluruh"	Informan Z sangat memahami akuntabilitas keuangan partai

3.	<i>"Transparansi itu adalah keterbukaan informasi kepada publik atau stakeholder"</i>	(Z 16-09-2023)	Keterbukaan informasi kepada publik (stakeholder)	Informan TB sangat memahami akuntabilitas keuangan partai politik
----	---	----------------	---	---

Sumber: Data diolah peneliti 2023

Bentuk Transparansi Keuangan Partai Gerindra

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang terpilih maka peneliti mendapatkan poin penting tentang bentuk transparansi dari pertanggungjawaban keuangan partai Gerakan Indonesia Raya:

"kami telah melaporkan kepada pemerintah, kemudian bisa dicek di website kami" (S, 16-09-2023)

"informasi bisa didapat dari webside Gerindra, maupun sumber-sumber lain seperti dikesbampol" (Z, 16-09-2023)

"bentuk transparansinya itu masyarakat bisa mengecek di website kami dan itu ada" (H, 16-09-2023)

Dari cuplikan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya para informan dari pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya secara umum sangat mengetahui bentuk dari transparansi keuangan partai politik itu sendiri. Jika dilihat dari kutipan serta penjelasan diatas, maka bilah digambarkan dalam berbentuk tabel akan terbentuk sebagai berikut:

Tabel 5.

Bentuk Transparansi Partai Gerindra

No	Cuplikan	Informan	Bentuk Transparansi	Makna
1.	<i>"kami telah melaporkan kepada pemerintah, kemudian bisa dicek di website kami"</i>	(S, 16-09-2023)	"keterbukaan akses di wesite Gerindra"	Informan S sangat mengetahui tentang akuntabilitas keuangan partai Gerindra
2.	<i>"informasi bisa didapat dari webside Gerindra, maupun sumber-sumber lain seperti dikesbampol"</i>	(Z, 16-09-2023)	"keterbukaan secara menyeluruh"	Informan Z sangat mengetahui akuntabilitas keuangan partai Gerindra
3.	<i>"bentuk transparansinya itu masyarakat bisa mengecek di website kami dan itu ada"</i>	(H, 16-09-2023)	Bisa diakses oleh publik (stakeholder) di wesite Gerindra	Informan H sangat memahami dan mengetahui akuntabilitas keuangan partai politik

Sumber: Data diolah peneliti 2023

KESIMPULAN (Level 1)

Berdasarkan hasil penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi keuangan Partai Gerindra, maka dapat disimpulkan beberapa bahwa Partai Gerindra telah mempertanggungjawabkan

keuangannya dalam bentuk laporan keuangan, namun belum mengacu pada ISAK No. 35. Partai Gerindra dalam mengelolah keuangan yang bersumber dari APBN sudah dilakukan secara transparan. Laporan keuangan yang disajikan oleh Partai Gerindra meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan saat ini sudah berlaku Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35 sebagai ganti atas PSAK 45. Yang didalamnya memuat tentang laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Abadi, Songga Aurora. 2020. "Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4(2): 328.
- Amer, Nabih. 2017. "Perspektif Negara Hukum : Analysis Dissemination of Community Organizations In The Perspective Legal Countries." *Jurnal Legalitas Fakultas Hukum Universitas Gorontalo* 15(1): 1–15.
- Dewa Rumphas, Nasrullah, Nurlisna, Evi Oktarina. 2016. "PRO KONTRA PENCABUTAN HAK MENDUDUKI JABATAN PUBLIK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA." 85: 1–23.
- Dahlia, Dahlia, Nurhidayah Nurhidayah, and Nurul Listiawati. 2019. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Banggae Kabupaten Majene)." *Sebatik* 23(2): 292–300.
- Efrida Sari Ramayani, Siahaan, Nurlaila, and Sri Sudiarti. 2023. "Analisis Penerapan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Berdasarkan ISAK No . 35 Pada Masjid Di Kota Medan." *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 4(35): 5196–5206. <http://journal.yrpiipku.com/index.php/msej>.
- Elfadarayanti, Esmeralda. 2021. "Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Agung Khairullah." *JAKA Akuntansi, Keuangan dan Auditing* 2(1): 38–54.
- Ruhadi, Giri Harto Wiratomo. 2021. "Building the Character and Thought Structure of Political Actors based on Pancasila Politics." 4(Wdpuns): 152–59.
- Jaya, Sumber, and Muaro Jambi. 2023. "Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Non Profit Di Desa." 7(2): 324–32.
- Juliestar, Mayki Ayu. 2018. "Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Sebagai Dasar Good Political Party Governance." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Juniar, Afif. 2021. "Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki Dan Korupsi Partai Politik." *Jurnal Politikom Indonesiana* 6(1): 17–39.
- Marbun, Rocky. 2022. "Konferensi Pers Dan Operasi Tangkap Tangan Sebagai Dominasi Simbolik: Membongkar Kesesatan Berpikir Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ius Constituendum* 7(1): 1.
- Maulana, Iqbal Subhan, and Mujibur Rahmat. 2021. "Penerapan Isak No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa." *JAJA Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing* 3(2): 63–75.
- Prasko, Bambang Sutomo, Bedjo Santoso. 2016. "PENYULUHAN METODE AUDIO VISUAL DAN DEMONSTRASI TERHADAP PENGETAHUAN MENYIKAT GIGI PADA ANAK SEKOLAH DASAR Prasko © 1 , Bambang Sutomo 2 , Bedjo Santoso 3." 03(2): 1–5.
- Natasyah, Oka Counstanta. 2019. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi DPD Partai Golkar Kota Surabaya Terhadap Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik." *Jurnal Politik Muda* 7(3): 93–107.

- Negara, Jurnal Administrasi et al. 2023. "Peranan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan." 1(1): 25–33.
- Nurimansyah, Muwaffiq, and R Misriah Ariyani. 2020. "Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Partai Politik Menuju Democracy Maturity." *Jurnal Economic Resource* 2(2): 114–27.
- Perjuangan, Indonesia et al. 2022. "Problems of Political Institution Indonesian Democracy Party of the Struggle (Pdi-p) in West Sumatra Province 2019-2022 Period." 1(2): 37–44.
- Rafiansyah, R, S Aisyah, and T Satrio. 2022. "Hubungan Akuntabilitas Dan Transparansi Sektor Organisasi Nirlaba Pada Lembaga Pemerintahan." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah ...* 1(8): 2575–79. <http://www.ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/601%0Ahttp://www.ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/download/601/500>.
- Rakia, A. Sakti R. S. 2021. "Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19." *SIGN Jurnal Hukum* 2(2): 157–73.
- Siahaan, Jerico, Fakultas Ilmu Budaya, and Universitas Udayana. 2019. "75604-889-223786-1-10-20210715 (2)." (2): 60–68.
- Sukran, Rajindra, and Dicky Yusuf. 2020. "Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah An Analysis of Quality of Central Sulawesi Government Financial Report." *Jurnal Kolaboratif Sains* 03(08): 421–29.
- Syifa, Syifaatuz Zadida Ilyas, Ana Sopanah, Dwi Anggarani, and Khojanah Hasan. 2023. "Mengungkap Praktik Akuntansi Budaya Dalam Upacara Adat Pelantikan Orang Kay Suku Kei Maluku." *Owner* 7(3): 1999–2009.
- Zamzam, Irfan et al. 2021. "Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Maluku Utara." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(2): 01–011.